

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM RESILIENSI
PENGURANGAN RESIKO BENCANA BANJIR DI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Hilman Afsal Bilahmar

NPP. 31.0922

*Asdaf Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: hilmanafsal@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. M. Amin, M.M, M.Ak

ABSRTACT

Problem statement/Background (GAP): flooding is one of the disasters that often occurs in Kendari City. The amount of damage caused to facilities and infrastructure, public facilities, gardens, rice fields and residential areas, especially in areas around river flows and estuaries. Various methods have been taken to anticipate the flood disaster itself. One of them is by taking action to reduce risks and increase resilience in facing disasters. **Purpose:** the aim of this research is to find out and describe the regional government's strategy for resilience in reducing the risk of flood disasters in Kendari City as well as resilience efforts in increasing its resilience in facing floods. **Method:** this research uses a qualitative method with a descriptive approach and inductive data analysis. Apart from that, the researchers' data sources are people, places and documents with the data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. The theory used is the strategy analysis theory according to Kooten and the resilience concept from UNISDR. **Result:** the results of this research show that several indicators of the implementation of regional government strategies for resilience in reducing flood disaster risk in Kendari City have been implemented well. However, there are still several shortcomings, such as limited budget availability and the Kendari City government still does not pay enough attention to agencies working in the disaster sector because they feel that disasters with large impacts rarely occur in Kendari City. The suggestion from researchers is that there is a need for good budget management by the Kendari City government so that all programs can run well.

Keywords: Strategy, Resilience, Risk Reduction, Flood.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banjir yang merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Kota Kendari. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan seperti sarana dan prasarana, fasilitas umum, kebun, sawah dan daerah permukiman khususnya pada daerah sekitar aliran dan muara sungai. Berbagai cara dilakukan untuk mengantisipasi bencana banjir itu sendiri. Salah satunya dengan cara tindakan pengurangan resiko dan meningkatkan

ketahanan dalam menghadapi bencana. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam resiliensi pengurangan resiko bencana banjir di Kota Kendari serta upaya resiliensi dalam meningkatkan ketahanannya dalam menghadapi banjir. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis data induktif. Selain itu, sumber data peneliti adalah orang, tempat dan dokumen dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori analisis strategi menurut kooten dan konsep resiliensi dari UNISDR. **Hasil/Temuan:** hasil dari penelitian ini bahwa beberapa indikator dari pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam resiliensi pengurangan resiko bencana banjir di Kota Kendari telah terlaksana dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti ketersediaan anggaran yang terbatas dan pemerintah Kota Kendari masih kurang memperhatikan instansi yang bergerak dalam bidang kebencanaan karena merasa bencana yang dampaknya besar jarang terjadi di Kota Kendari. **Kesimpulan:** Strategi Pemerintah Kota Kendari belum sudah berjalan dengan cukup baik Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti sesosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tetapi belum maksimal diterapkan oleh masyarakat sehingga tidak munculnya kemandirian masyarakat dalam menangani bencana banjir.

Kata Kunci: Strategi, Resiliensi, Pengurangan Resiko, Banjir.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Kendari merupakan salah satu wilayah dengan topografi rendah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga memiliki potensi besar rawan terjadi bencana banjir. Selain memiliki topografi yang rendah, banjir di Kota Kendari disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu curah hujan tinggi yang tidak dimbangi dengan daerah resapan air, peningkatan perluasan tanah di sepanjang daerah aliran sungai, pembangunan drainase yang belum maksimal dan sedimentasi yang terjadi di sepanjang daerah aliran sungai yang tergolong cukup tinggi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Kendari.

Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah membentuk badan yang bergerak dalam penanggulangan bencana yaitu: BNPB (tingkat nasional) sejalan dengan hal tersebut dibentuklah peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPPD pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan berbagai upaya berupa peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam

pengurangan resiko bencana banjir. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya yang berada pada daerah rawan banjir.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir di Kota Kendari, salah satunya yaitu kondisi topografi yang begitu rendah sehingga ketika musim hujan tiba menyebabkan luapan air ke area pemukiman masyarakat yang mengakibatkan banjir terjadi. Selain itu, peningkatan perluasan tanah terbuka membuat daerah resapan air menjadi berkurang dan pola pembangunan drainase yang belum maksimal juga menjadi salah satu penyebab terjadi banjir. Banjir yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini mengakibatkan banyak warga harus mengungsi dikarenakan rumah mereka terdampak banjir selain itu terjadi juga kerusakan sarana dan prasarana fasilitas umum. Berikut ini merupakan data kejadian banjir di Kota Kendari tahun 2018 – 2021:

No	Korban Banjir Kota Kendari 2018-2022		
	Rumah Terendam	Jumlah Jiwa Menderita	Tahun
1	1093	4648	2018
2	225	947	2019
3	-	869	2020
4	-	491	2021
5	149	-	2022

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari diakses 30 September 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 di Kota Kendari korban bencana banjir yakni 4648 jiwa yang menderita serta rumah yang terendam sebanyak 1093 rumah. Kemudian pada tahun 2021 yang lalu terjadi bencana banjir dengan rumah terendam sebanyak 149 rumah (BNPB, 2023). Hal ini menandakan bahwa masih tingginya tingkat kerusakan yang diakibatkan bencana banjir di Kota Kendari.

1.3 Penelitian Terdahulu

Manfaat penelitian sebelumnya adalah sebagai kerangka kerja untuk penelitian. Selain itu dapat membantu dalam mengetahui persamaan dan perbedaan signifikan yang dibuat oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini didasari dari beberapa penelitian sebelumnya dalam rangka mengetahui strategi yang digunakan dalam resiliensi pengurangan resiko bencana banjir. Penelitian pertama oleh Sri Dian K.H Eato (2017) yang berjudul “Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” menjelaskan bahwa Rumusan strategi penanganan berbasis mitigasi bencana dihasilkan dari mitigasi struktur (fisik) – mitigasi non struktur (non fisik) yang berfungsi untuk mengurangi nilai kelas risiko.

Penelitian kedua dari Ayu Sekar Ningrum yang berjudul “Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa” menjelaskan bahwa Strategi penanganan banjir dengan mitigasi bencana di kawasan rawan banjir di Kota Langsa terbagi menjadi dua, yakni: (1) Mitigasi struktural berupa penjelasan tentang pembuatan bangunan pengendali banjir ; (2) Mitigasi non struktural berupa pelatihan mitigasi bencana, serta evaluasi kebijakan pengurangan risiko banjir pada kawasan rawan banjir di Kota Langsa, Aceh, Indonesia.

Penelitian ketiga dari Yenny Nur Amalia (2018), “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Tanggap Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik” menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam membangun partisipasi masyarakat tanggap bencana banjir adalah dengan memberdayakan masyarakat secara mandiri untuk tanggap bencana di daerah yang berpotensi mengalami bencana banjir. Dalam memberdayakan masyarakat tersebut BPBD melakukan tindakan - tindakan yang berisi program serta kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk bisa tanggap bencana.

Penelitian keempat dari Sukarno, Rike Rismawati Mangende., Alex Binilang. 2016. “Perencanaan Saluran Penanggulangan Banjir Muara Sungai Tilamuta” menjelaskan bahwa pengendalian banjir yang dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Kabupaten Boalemo pada sungai tilamuta belum dapat menampung debit air maksimum sehingga diperlukannya saluran yang dapat menampung dan mengalirkan debit banjir.

Penelitian Kelima dari Arisanti, Fitriadi, & Kumalawati. (2017). “Tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tanah longsor di desa jaro kecamatan jaro kabupaten tabalong” kesiapsiagaan masyarakat di Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong bisa dikatakan sudah siap, hal ini dapat dilihat dari program yang dilaksanakan oleh masyarakat tentang program kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tanah longsor di Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

Penelitian Keenam dari Siti Safiyah Babay dan Aristotulus E.Tungka (2016). “Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” menjelaskan bahwa penanggulangan mitigasi bencana banjir mulai dari tindakan sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sehingga masyarakat dapat meminimalisir dampak bencana banjir. Bentuk partisipasi tersebut sudah diimplementasikan dan efektif di dalam masyarakat ketika bencana banjir akan datang.

Penelitian Ketujuh dari Ananda Urbanus dan Rieneke Lusiana Evani Sela. “Mitigasi Bencana Banjir Struktural Dan Non-Struktural Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan” menjelaskan bahwa mitigasi bencana yang dilakukan menyesuaikan dengan tingkat risiko dari bencana dimana desa dengan risiko bencana banjir tinggi yaitu direkomendasikan membuat rencana tentang pembangunan fisik (struktural) dalam upaya mengurangi bahaya dari banjir, kemudian desa dengan risiko bencana banjir sedang yaitu direkomendasikan untuk

penambahan maupun perbaikan mengenai bentuk fisik (struktural) pengendalian banjir yang telah ada maupun belum ada, dan daerah dengan risiko bencana banjir rendah yaitu direkomendasikan untuk perbaikan mengenai bentuk fisik (struktural) pengendalian banjir yang telah ada, namun belum maksimal dalam sistem pelaksanaannya.

Penelitian kedelapan dari Amin, M. dkk. (2023) “Analisis Keterpaduan Resilient Terhadap Risiko Bencana dan Tangguh Bencana Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat” menjelaskan bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dapat meningkatkan ketangguhan dan ketahanan serta mengurangi risiko bencana yang terjadi.

Penelitian kesembilan dari Nasyirudin (2015), “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng”. Menjelaskan bahwa pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana; penghijauan yang dilakukan sebagai resapan air dari daerah hulu (pegunungan) untuk mengurangi banyaknya aliran debit air ke daerah hilir; pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik; penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti pembangunan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai; peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik.

Penelitian Kesepuluh dari Nanda Galih Saputra (2021). “Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang Di Desa Karangligar Sebagai Desa Tangguh Bencana” menjelaskan bahwa Strategi penanggulangan bencana banjir Desa Karangligar dimuat dalam penyelenggaraan kebencanaan mulai dari pra bencana, saat bencana terjadi dan pasca bencana, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari masih adanya kelemahan-kelemahan didalamnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Ada beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu bagaimana strategi pemerintah daerah Kota Kendari dalam resiliensi pengurangan risiko bencana banjir dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi banjir melalui kegiatan mitigasi, adaptasi dan inovasi dari berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Kendari.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah daerah dalam resiliensi pengurangan risiko bencana banjir di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan masyarakat Kota Kendari dalam menghadapi banjir.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data induktif melalui akses data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengatui

kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung yang kemudian dideskripsikan melalui kata – kata dan bahasa sesuai dengan metode ilmiah. Menurut Moleong (1990: 3) menjelaskan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau secara tidak tertulis (lisan) dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya”.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala BPBD Kota Kendari, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kota Kendari, Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Kendari dan 6 orang masyarakat. Selain itu dalam pengumpulan data dokumentasi peneliti menggunakan peraturan perundang – undangan, surat edaran BPBD, RKPD BPBD, Arsip BPBD, serta gambar/foto yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir. Peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi beberapa wilayah rawan banjir di Kota Kendari. Adapun beberapa cara analisis data dengan menggunakan 4 tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan strategi pemerintah daerah dalam resiliensi pengurangan resiko bencana banjir di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan Teori Strategi dari Kooten dengan indikator strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya dan strategi kelembagaan serta Konsep Resiliensi dengan indikator mitigasi, adaptasi dan inovasi.

3.1 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Resiliensi Pengurangan Resiko Bencana Banjir Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

3.1.1 Strategi Organisasi

Strategi organisasi adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi guna mencapai visi yang ditentukan dalam organisasi yang merupakan bagiannya. Strategi ini disebut sebagai *Grand Strategy* karena akan mendukung penelitian yang didasari pada hasil tiap – tiap kegiatan yang dilakukan organisasi dan apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya akan berakibat fatal. Secara keorganisasian strategi pemerintah Kota Kendari ditinjau dari segi dan visi dari pj. Walikota Kendari dalam resiliensi pengurangan resiko bencana banjir memiliki visi yang berfokus pada tindakan pencegahan bencana banjir dengan meninjau dan membangun mitigasi secara struktural dan tepat non struktural dengan misi misi yaitu melakukan peninjauan kembali infrastruktur pencegah bencana banjir dan pembangunan masyarakat tangguh bencana, yang nantinya akan memberikan nilai dalam pengurangan risiko bencana banjir.

Pencegahan terjadinya bencana banjir merupakan strategi yang diutamakan oleh pemerintah Kota Kendari sebagai *Grand Strategi* dalam resiliensi pengurangan resiko bencana banjir di Kota Kendari. Melalui BPBD Kota Kendari sebagai perangkat daerah yang memiliki fokus utama dalam tindakan penanggulangan bencana banjir menerapkan prinsip dari *Smart Governance* merupakan tolak ukur dalam memberikan pelayanan. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana maka perlunya perencanaan dan koordinasi yang baik dalam membangun komunikasi kepada masyarakat sehingga terjalin pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Strategi organisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari sudah sangat tepat yaitu memfokuskan pada tindakan – tindakan pencegahan bencana banjir yang akan terjadi sebagai *grand strategi*, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan waktu dan anggaran yang sangat banyak. Oleh sebab itu, perlunya keterlibatan dari berbagai *stakeholder* dalam meningkatkan jaringan komunikasi agar pelaksanaan pencegahan dapat dianggap masalah umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari.

3.1.2 Strategi Program

Strategi program merupakan suatu perencanaan dan manajemen untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok dari sebuah organisasi mencakup kebijakan dan tahap kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam ini, pemerintah Kota Kendari mempunyai program – program dalam hal pengurangan resiko banjir yaitu program pertama membuat titik evakuasi di tiap kelurahan di Kota Kendari agar membantu masyarakat melakukan proses evakuasi ketempat yang aman saat terjadi banjir. Program kedua, Pembentukan Tim Reaksi Cepat dan Kelompok Siaga Bencana agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan para relawan dan masyarakat ketika banjir terjadi. Program ketiga, pembaharuan infrastruktur seperti normalisasi drainase dan sarana prasarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana banjir untuk meminimalisir kerugian dari bencana banjir di Kota Kendari. Program keempat, pemerintah Kota Kendari melalui BPBD Kota Kendari melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membangun masyarakat yang tahan terhadap bencana banjir.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat telah merasakan dampak positif dari program – program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari. Melalui program pembuatan titik evakuasi membuat masyarakat tahu akan apa yang akan dilakukan jika terjadi bencana banjir khususnya untuk berkumpul di titik evakuasi sehingga kerugian berupa korban jiwa dapat diminimalisir dan bisa mempermudah pemerintah Kota Kendari untuk melakukan evakuasi ketempat yang lebih aman. Program pembaharuan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari tidak lepas dari konsep pentahelix dimana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi bersama para *stakeholder* untuk membangun kesadaran secara kolektif khususnya dalam penanggulangan bencana banjir agar Kota Kendari bisa membangun ketahanan dalam menghadapi bencana banjir sehingga dapat meningkatkan kualitas pengurangan risiko bencana banjir.

Konsep resiliensi menjadi dasar pemerintah Kota Kendari dalam membentuk masyarakat yang tangguh dan tahan terhadap bencana karena masyarakat mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan bencana yang akan terjadi. Masyarakat yang tahu akan apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana maka risiko dari bencana tersebut dapat berkurang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari menganggap sosialisasi yang dilakukan sangat penting untuk masyarakat dalam meningkatkan kepedulian masyarakat. Oleh sebab itu, program merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggapai sasaran dan tujuan juga mendapatkan kegiatan oleh masyarakat yang dikoordinasikan dengan organisasi masyarakat atau alokasi anggaran. Dalam hal pelaksanaan sebuah program akan berhasil, kurang berhasil, bahkan gagal sama sekali apabila dilihat dari *outcomes*. Program terkait pengurangan resiko bencana banjir telah dilaksanakan dan diharapkan mampu mengurangi resiko atau kerugian dari bencana banjir di Kota Kendari. Selain itu, BPBD berharap agar masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam melakukan program terkait resiliensi pengurangan risiko bencana banjir.

3.1.3 Strategi Sumber Daya

Pemerintah Kota Kendari selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan para masyarakat dalam bentuk sosialisasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melaksanakan pelatihan dan pengembangan kualitas kepada KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan tim TRC (Tim Reaksi Cepat) dengan pemberian materi penanggulangan bencana dan pembagian tanggung jawab saat terjadi bencana banjir. Selain itu, pihak BPBD melakukan bimbingan teknis kepada para aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam upaya penanggulangan bencana banjir.

Proses penanggulangan bencana banjir ini juga tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi unsur penting dalam organisasi dalam menunjang kegiatan – kegiatan organisasi guna membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam melakukan penanggulangan bencana banjir. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana banjir di Kota Kendari bergantung terhadap ketersediaan anggaran yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi anggaran yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari harus dapat dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana banjir serta melakukan pembaharuan kapasitas serta kualitas dari pelayanan baik dari koordinasi antar aparatur sampai ketersediaan sarana maupun prasarana yang layak guna meminimalisir dampak banjir.

Ketersediaan sumber daya ini menjadi landasan suatu organisasi agar dapat menjalankan segala kewajibannya dengan baik. Dengan ketersediaan sumber daya yang baik perlu diimbangi dengan manajemen yang efektif dan efisien dari sebuah organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

3.1.4 Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan merupakan suatu langkah atau upaya dari inisiatif – inisiatif dari lembaga terkait dalam menghadapi sebuah permasalahan untuk memperbaiki struktur, proses, dan kebijakan yang dibuatnya agar lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan lembaga. Pemerintah Kota Kendari memiliki beberapa strategi kelembagaan dalam menanggulangi bencana banjir yang meliputi inisiatif terbaru, koordinasi antar lembaga dan menjaga kelestarian ekologi.

Melalui BPBD, Pemerintah Kota Kendari memiliki beberapa strategi kelembagaan dalam hal resiliensi pengurangan resiko bencana banjir yaitu melakukan inisiatif – inisiatif kegiatan kolaboratif seluruh aparatur pemerintahan daerah yang terdiri dari BPBD, Pol PP, Damkar dan TNI/Polri yang bersama membuat kegiatan SPAG yaitu kegiatan penyuluhan dan edukasi serta pelatihan kepada siswa pada tingkat sekolah dasar untuk mengetahui potensi bencana sejak dini. Pihak BPBD juga melakukan koordinasi bersama beberapa instansi terkait seperti Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun dan membuat program serta pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung dalam pengurangan resiko bencana banjir.

3.2 Upaya Dalam Meningkatkan Ketahanan Terhadap Pengurangan Resiko Bencana Banjir

3.2.1 Mitigasi

Mitigasi merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman dari suatu bencana. Secara umum mitigasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

Pemerintah Daerah Kota Kendari melakukan tindakan mitigasi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana banjir di Kota Kendari. Tindakan mitigasi tersebut dilakukan oleh beberapa instansi terkait seperti BPBD Kota Kendari, PUPR Kota Kendari dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari melakukan berbagai tindakan mitigasi dalam menghadapi bencana banjir. Upaya mitigasi struktural yang dilakukan pihak BPBD adalah melakukan kerja bakti bersama masyarakat di setiap kelurahan yang dilakukan setiap seminggu sekali. Upaya mitigasi non struktural yang dilakukan BPBD Kota Kendari berupa kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat khususnya pada daerah rawan bencana banjir mengenai cara mencegah, mengelola dan mengurangi resiko banjir. Selain itu, upaya non struktural lainnya yang dilakukan oleh BPBD adalah melakukan perencanaan tata ruang. Namun, dalam pelaksanaan mitigasi tersebut belum dapat berjalan secara maksimal karena adanya keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, dalam mengatasi keterbatasan anggaran dalam penanggulangan bencana banjir maka dibutuhkan kreativitas, kerja sama dan penggunaan sumber daya yang efisien.

Dinas PUPR dalam pengurangan resiko bencana banjir melakukan pembuatan kolam retensi dan kolam endapan yang berfungsi sebagai penyimpanan air berlebih dan pengendalian air yang berlebihan selama periode curah hujan

sehingga dapat membantu dalam mengurangi volume air yang mengalir ke sistem drainase

Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari melakukan normalisasinya sungai berupa kegiatan pengembalian fungsi sungai melalui tindakan pembersihan dan pengangkatan sampah – sampah dan sedimen yang ada di sepanjang daerah aliran sungai. Selain itu, kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh seluruh ASN dan masyarakat setiap hari selasa dan jumat. Upaya mitigasi non struktural yang dilakukan yaitu menghimbau langsung masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya himbauan langsung namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari mengajak masyarakat melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dalam meningkatkan ketahanan terhadap pengurangan resiko banjir.

3.2.2 Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu kemampuan penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungan baru atau perubahan dalam lingkungan yang sudah ada sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman. Kegiatan adaptasi ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu adaptasi fisik, adaptasi sosial dan adaptasi lingkungan.

Adaptasi sosial yang dilakukan pihak BPBD adalah melakukan sosialisasi bencana kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah aliran sungai. Selain itu, Pihak BPBD dapat memberdayakan komunitas dan relawan yang ada dengan memberikan informasi dan membantu koordinasi serta menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan sosialisasi. Adaptasi lingkungan yang dilakukan BPBD dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat berupa pembuatan grup chat dengan para lurah di setiap wilayah untuk memudahkan dalam penyebaran informasi atau edaran – edaran terkait kondisi atau potensi bencana yang akan terjadi.

Adaptasi fisik yang dilakukan Dinas PUPR berupa rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana serta meningkatkan fungsinya untuk mengurangi resiko banjir. Rehabilitasi ini menjadi langkah yang penting untuk memastikan kondisi infrastruktur masih berfungsi dengan baik dan masih memenuhi standar keamanan serta ketahanan terhadap bencana. Selain itu, perlunya edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga sarana prasarana tersebut.

Adaptasi fisik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup berupa menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi resiko banjir serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Dengan lingkungan yang terjaga dengan baik memiliki sistem drainase yang baik, vegetasi yang memadai dan saluran air yang bersih sehingga dapat menjadi faktor utama dalam membantu mengurangi resiko bencana banjir. Adaptasi sosial yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi suatu individu terhadap lingkungannya berupa kegiatan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah yang dapat mengurangi potensi dari bencana banjir. Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari juga membuat tim – tim relawan yang bertindak sebagai pendukung dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang bertugas untuk memonitor kondisi lingkungan pada titik - titik yang telah ditetapkan serta dapat mengambil keputusan berupa tindak pencegahan yang

tepat dilakukan guna meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan masyarakat pada kawasan rawan banjir.

3.2.3 Inovasi

Inovasi merupakan suatu proses atau hasil dari penciptaan sesuatu yang baru atau perubahan yang signifikan dalam cara – cara berpikir, bekerja atau menghasilkan suatu barang atau layanan yang meliputi pengembangan ide – ide baru, penemuan solusi dalam penyelesaian suatu masalah. Inovasi bencana ini terbagi menjadi 3 (tiga) indikator yaitu regulasi, teknologi, informasi dan komunikasi serta manajemen bencana. Pemerintah Kota Kendari melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan ketahanan menghadapi bencana banjir melalui 3 perangkat daerah yaitu BPBD, PUPR dan DLH.

Pihak BPBD Kota Kendari melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir seperti penerbitan dokumen kajian resiko bencana 5 tahun kedepan yang bertujuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi bencana serta dampaknya terhadap manusia. Kemudian, implementasi dari Peraturan daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2011 menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan berbagai program kebencanaan . Akan tetapi, dalam proses manajemen yang dilakukan masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan alat peringatan dini yang belum maksimal di semua titik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Dinas PUPR didasari oleh Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Darurat Akibat Daya Rusak Air untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana banjir yang terjadi. Kemudian, Pengembangan Smart Water Management (SMW) yang bertujuan untuk mengukur kuantitas dan kualitas penggunaan air, pemantauan keamanan infrastruktur sumber daya air dan penanganan resiko bencana yang berkaitan dengan air. Dinas PUPR juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu tertentu pada saluran drainase dan daerah aliran sungai.

Pelaksanaan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari yang menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Kendari didasari oleh Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebersihan dan Keindahan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari selalu melakukan monitoring terhadap penanganan sampah pada daerah – daerah rawan banjir. Pelaksananya mencakup pemantauan tingkat kebersihan saluran air, sistem drainase dan titik – titik rawan penumpukan sampah yang dapat menyebabkan penyumbatan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Peneliti

Strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan mengurangi resiko bencana banjir perlu dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan sehingga dapat menunjang segala aktivitas penanggulangan bencana banjir di Kota Kendari.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa ketersediaan anggaran yang kurang memadai pada setiap kegiatan atau program kebencanaan sehingga upaya yang dilakukan belum tercapai secara maksimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah melaksanakan berbagai strategi dalam resiliensi pengurangan resiko banjir melalui program – program pencegahan berupa identifikasi lokasi, peningkatan kapasitas dan koordiansi dengan berbagai *stakeholder* dalam mengurangi resiko banjir di Kota Kendari. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala perihal anggaran dimana dana yang dialokasikan tidak selalu mencukupi untuk melakukan semua hal yang direncanakan.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pengurangan resiko banjir melalui tindakan mitigasi, adaptasi dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kota Kendari.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam resiliensi pengurangan resiko bencana banjir di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Kendari khususnya Kepala BPBD Kota Kendari beserta jajarannya, Kepala Dinas PUPR Kota Kendari beserta jajarannya dan Kepala DLH Kota Kendari yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, A. W., dkk. 2021. *IRBI Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2021*. R. Yunus. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Komunikasi \\Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia: Salemba. 4 Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Salusu J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Salusu J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. PT. Grasindo: Jakarta
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Literasi Media Publishing: Yogyakarta.

Peraturan Undang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008. tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2011. tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari.

Artikel

- Amalia, Yenny Nur. Maya Mustika Kartika Sari. 2018. *“Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Tanggap Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik”*. Gresik : UNESA
- Amin, M dkk. 2023. *“Analisis Keterpaduan Resilient Terhadap Resiko Bencana dan Tangguh Bencana Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”*. Mataram: IPDN kampus NTB.
- Anshary, Muhammad. 2022. *“Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/Kpts/2020 Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid-19) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”*. Medan: Universitas Medan Area.

